

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KELURAHAN PALUPI KECAMATAN TATANGA KOTA PALU**

**Ristamala<sup>1)</sup>, Moh. Irfan Mufti<sup>2)</sup>, Fiki Ferianto<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

[mrستا828@gmail.com](mailto:mrستا828@gmail.com)

<sup>2</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

[irfanmufti66@gmail.com](mailto:irfanmufti66@gmail.com)

<sup>3</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

[fiki.ferianto@gmail.com](mailto:fiki.ferianto@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Palupi, Kota Palu. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ProKlim di Kelurahan Palupi telah melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pengelola program, dan masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan teori Ansell dan Gash, aspek kondisi awal menunjukkan adanya hubungan yang cukup baik antar aktor, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Dari aspek desain kelembagaan, pelaksanaan program telah mengacu pada regulasi yang ada, namun belum didukung oleh pendanaan yang memadai. Pada aspek kepemimpinan fasilitatif, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat melalui pendampingan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan. Sementara itu, proses kolaborasi menunjukkan adanya komunikasi, pembangunan kepercayaan, serta berbagi pemahaman yang cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kolaborasi dalam pelaksanaan ProKlim di Kelurahan Palupi telah berjalan cukup efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan serta partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

**Kata Kunci:** *Collaborative governance*, ProKlim, Perubahan Iklim, Partisipasi Masyarakat

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of Collaborative governance in the Climate Village Program (ProKlim) in Palupi Village, Palu City. This program is a government initiative to enhance community resilience to climate change through adaptation and mitigation activities based on community participation. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the implementation of ProKlim in Palupi Village involves collaboration among local government, village authorities, program managers, and the community. Based on Ansell and Gash's Collaborative governance framework, the initial conditions indicate relatively good relationships among stakeholders, although limitations in resources and coordination remain. In terms of institutional design, the program has followed existing regulations but lacks sufficient financial support. Facilitative leadership is reflected in the role of government as a facilitator that encourages community participation through assistance and direct involvement in activities. Meanwhile, the collaborative process demonstrates ongoing communication, trust-building, and shared understanding, although these aspects still need continuous improvement. Overall, the collaboration in implementing ProKlim in Palupi Village has been relatively effective and has contributed positively to environmental quality improvement and community participation. However, several challenges persist, including limited resources, suboptimal coordination, and uneven public understanding of the program. Therefore, strengthening coordination, improving resource capacity, and ensuring continuous government support are necessary to enhance the effectiveness and sustainability of the program.*

**Keywords:** *Collaborative governance, Proklm, Climate Change, Community Participation*

Submisi: 27-01-2026  
Diterima: 28-01-2026  
Dipublikasikan: 02-02-2026

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan global yang memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan pada tingkat global, tetapi juga pada tingkat lokal melalui peningkatan suhu udara, perubahan pola curah hujan, banjir, kekeringan, serta kerusakan lingkungan. Indonesia sebagai negara tropis termasuk salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim karena memiliki kondisi geografis yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Pelaksanaan Program Kampung Iklim didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Program ini mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi air, pemanfaatan lahan pekarangan, serta berbagai kegiatan lingkungan lainnya sebagai bentuk menyikapi terjadinya bencana.

Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Program Kampung Iklim dan berhasil memperoleh penghargaan ProKlim Utama. Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah dalam menjaga lingkungan. Salah satu wilayah yang aktif dalam pelaksanaan ProKlim adalah RW 7 dengan jumlah penduduk sebanyak 983 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan potensi partisipasi masyarakat yang cukup besar dalam mendukung pelaksanaan program lingkungan.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim melibatkan berbagai pihak sehingga membutuhkan tata kelola kolaboratif yang baik. *Collaborative governance* menjadi pendekatan yang relevan untuk melihat bagaimana pemerintah, pengelola program, dan masyarakat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Ansell dan Gash (2008), *Collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah dan stakeholder non pemerintah secara langsung dalam mencapai tujuan publik melalui dialog dan kerja sama. Meskipun Kelurahan Palupi telah memperoleh penghargaan ProKlim Utama, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, serta belum meratanya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana *Collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu berdasarkan teori Ansell dan Gash.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai *Collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemerintah kelurahan, pengelola Program Kampung Iklim, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative governance* Ansell dan Gash yang terdiri dari empat aspek utama yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu merupakan salah satu program lingkungan berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pengelola program, dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Kampung Iklim meliputi penghijauan lingkungan, pengelolaan sampah, kerja bakti lingkungan, pemanfaatan lahan pekarangan, dan konservasi air. Keberhasilan Kelurahan Palupi memperoleh penghargaan ProKlim Utama menunjukkan adanya kerja sama yang cukup baik antar stakeholder dalam menjalankan program lingkungan.

Kondisi awal dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Palupi menunjukkan adanya hubungan yang cukup baik antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat. Sebelum program dilaksanakan, masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti dan penghijauan. Pemerintah kelurahan juga memberikan dukungan melalui koordinasi dengan masyarakat dan pengelola program. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya dan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan lingkungan.

Kepemimpinan fasilitatif terlihat dari peran pemerintah kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pendampingan, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan lingkungan. Pemerintah aktif mengajak masyarakat untuk

berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, penghijauan, dan pengelolaan sampah. Selain pemerintah, pengelola Program Kampung Iklim juga berperan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif memberikan dampak positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Proses kolaboratif dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Palupi terlihat melalui adanya komunikasi dan kerja sama antar stakeholder. Pemerintah, pengelola program, dan masyarakat melakukan koordinasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan lingkungan.

Kegiatan seperti penghijauan, kerja bakti, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan lahan dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, proses kolaboratif juga menunjukkan adanya pembangunan kepercayaan dan komitmen bersama antar stakeholder dalam menjaga lingkungan. Keberhasilan Kelurahan Palupi memperoleh penghargaan ProKlim Utama menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan komunikasi dan dukungan berkelanjutan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu telah memberikan dampak positif terhadap upaya menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Berbagai kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, kerja bakti lingkungan, dan pemanfaatan lahan pekarangan telah dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat.

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan lingkungan berbasis masyarakat. Dukungan pemerintah melalui pendampingan dan koordinasi mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, keberhasilan Kelurahan Palupi memperoleh penghargaan ProKlim Utama menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Kampung Iklim masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, dan belum meratanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama, dukungan berkelanjutan, serta penguatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan Program Kampung Iklim dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Dewanti, R. (2021). *Collaborative governance* dalam pengelolaan program lingkungan berbasis masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 112–120.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for *Collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fauzi, A., & Hidayat, R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 6(1), 33–45.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Rahmawati, F., Yusuf, M., & Karim, A. (2023). Implementasi Program Kampung Iklim dalam adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat. *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–56.
- Sari, D., & Lestari, R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(1), 88–97.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A., & Lestari, N. (2022). Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam Program Kampung Iklim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(3), 67–76.
- Yuliana. (2021). Dampak perubahan iklim terhadap wilayah pesisir di Sulawesi Tengah. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 4(2), 100–109.

## **TENTANG PENULIS**